

RELASIONALITAS TATA HIDUP BERNEGARA

Pendalaman Perspektif Armada Riyanto Dari Para Peletak Dasar Filsafat Etika Politik

Antono Wahyudi

STFT Widya Sasana, Malang

Abstract:

In building and managing the order of life in a Nation, human being needs to own as well as to implement the ethics value. Ethics is neither a rule nor social norms that must be followed by human being. Instead, it is more emphasizing critically to the orientation of life so that he or she is free from the shackles of inauthentic consciousness. In addition, it must be realized that human being has the nature in building its relationality in order to accomplish the order of life. The implementation is started from the smallest group (family) which eventually will end up and gives full shape to the largest group (Nation). One of the most important components to bring out the relationality is to raise the awareness of the concept “I and Thou”, in which also simultaneously set in motion the virtues of friendship and dialogue. However, it is undeniable that human being also has a tendency to act arbitrarily. Therefore, it needs a collective agreement by habituating each individual to engage in dialogue and act fairly in order to build relationality for the sake of the order of life.

Keywords: Politik, Etika, Dialogal, Persahabatan, Individu, Pribadi, Keluarga, Sosialitas, Kapitalisme, Relasionalitas.

Antroposentrisme, secara historisitas, merupakan titik tolak lahirnya intelektualitas manusia dalam beradaptasi menghadapi alam sebagai tempat bermukim manusia. Antroposentrisme atau dapat juga dikatakan sebagai “keterpusatan pada manusia” memaksudkan pergeseran paradigma berpikir dari teosentrisme—dimana Tuhan dalam ruang lingkup pemerintahan menjadi ukuran dan rujukan realitas kehidupan manusia—ke akal budi (rasionalitas) manusia sebagai panglima tertinggi dalam menentukan segala tindak tanduk kehidupan manusia. Adalah Rene Descartes, seorang filosof Jerman, yang mencetuskan pemikiran bahwasanya kesadaran manusia merupakan kesadaran berpikir yang

menjadi fondasi lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan. Ketika Francis Bacon, yang juga seorang filosof, mengumandangkan bahwa pengetahuan merupakan “alat” kekuasaan, maka tak lama kemudian kapitalisme menjadi ideologi yang memayungi pola pikir serta gaya hidup manusia modern.

Kapitalisme tidak hanya bersinar pada belahan dunia Barat, tetapi ia juga—dengan kodratnya untuk mengembangbiakkan profit semata—menyebarkan dan mencengkram segala aspek kehidupan di seluruh penjuru dunia. Globalisasi menjadi tema populer kajian di kalangan akademisi dan aktivis. Apalagi ketika kapitalisme dengan sangat cerdas melakukan metamorfosa untuk dapat merasuki kesadaran masyarakat tanpa mendapat perlawanan. Agama yang dipandang suci dan merupakan *jalan* menuju kebahagiaan dan kebenaran, menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kapitalis bermukim. Pendidikan yang pada hakikatnya ialah untuk membangun bangsa, menjadi lahan subur kapitalisme untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Kesehatan menjadi sangat mahal ketika obat-obatan dan tenaga medis dapat diperjual-belikan tanpa memandang keselamatan manusia.

Kekacauan dunia menjadi paradigma yang tak dapat dipungkiri. Kekacauan ini memaksudkan adanya ketimpangan-ketimpangan sosial, ketidakadilan, bahkan kekerasan sekalipun telah menjadi rutinitas sehari-hari. Ditengah kekacauan seperti ini, lantas bagaimana peran kita (baik secara individu maupun kelompok) dalam menjalani kehidupan? Haruskah kita selamanya mengikuti arus globalisasi yang begitu hebatnya membawa kesadaran masyarakat? Bagaimana peran Negara (pemerintah) dalam menghadapi globalisasi? Dalam tulisan ini, terdapat ulasan sederhana menanggapi *status questionis* tersebut. Diawali dengan memahami terlebih dahulu tentang *orientasi kesadaran individualitas*. Dilanjutkan dengan pemahaman mengenai *kesadaran sosialitas aku-engkau* dan diakhiri dengan *perjanjian sosialitas dialogal*. Pokok-pokok bahasan tersebut diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman tentang relasi antara masyarakat dan pemerintah pada umumnya, serta prinsip-prinsip utama pada khususnya, yang dibutuhkan dewasa ini agar bangsa ini tidak terus “hanyut” dalam pusaran arus globalisasi.

1. Orientasi Kesadaran Individualitas

Ketika manusia lahir di dunia—dalam konteks postmodern—manusia menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Emile Durkheim, dimana lingkungan dalam ranah kolektifitas selalu membentuk pola kehidupan setiap individu. Djuretna A. Imam Muhni menjelaskan pemikiran Durkheim sebagai berikut:

Dalam diri manusia ada dua kesadaran: yang pertama ialah yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, yang bukan merupakan diri kita sendiri

melainkan jiwa masyarakat yang hidup dan bertindak di dalam sanubari kita, yang kedua, merupakan sesuatu yang bersifat pribadi dan ini berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lain, dan inilah yang menjadikan kita masing-masing seorang individu. Totalitas kepercayaan dan sentimen (rasa) yang dimiliki bersama oleh semua warga negara suatu masyarakat itu merupakan suatu sistem tertentu yang memiliki hidup sendiri. Hal itu dapat disebut insan kamil, atau kesadaran kolektif atau kesadaran komune [...] Individu-individu itu dapat larut atau hilang, namun kesadaran kolektif itu tetap ada. Keadaannya sama saja di mana pun ia berada, di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil dan di dalam profesi yang berbeda. Lebih dari itu ia tidak berubah mengikuti lahirnya generasi baru sebaliknya ia menjadi kokoh.⁹⁷

Dalam pandangan Durkheim, individu manusia di bentuk oleh lingkungan (kesadaran kolektif), bukan kesadaran masing-masing individu yang membentuk kesadarannya sendiri. Dalam dunia ekonomi dewasa ini, kapitalisme memiliki strategi yang begitu “teratur”, sehingga kesadaran masyarakat akan kebutuhan dan keinginannya dapat dengan mudah terarah kepadanya. Apakah hal ini yang mengakibatkan manusia “hanyut” dalam keseharian buah hasil kapitalisme? Tetapi jika kita perdalam lagi terkait konsep kesadaran individu dan kesadaran kolektif, mengenai *siapa* mempengaruhi *siapa*, akan menjadi cukup kompleks dan pembahasan ini akan berkepanjangan. Sehingga, barangkali untuk memudahkan pemahaman ini, kita perlu merujuk pada ruang lingkup religiusitas-historis. Memang filsafat tidak tertarik untuk membicarakan pada ranah ini. Tetapi, untuk sementara waktu, kita membutuhkan suatu fondasi atau *pegangan* agar tidak terjatuh pada *nihilisme*. Hal ini menjadi landasan agar tolok ukur mengenai manusia dapat dipahami secara menyeluruh.

Tolok ukur itu adalah penciptaan Adam sebagai *human being* pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah siapakah Adam (manusia)? Pertama-tama manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Armada Riyanto memberikan penjabaran bahwasanya manusia memiliki kesadaran “aku”. Hal inilah yang membedakan dirinya dengan makhluk lain yang diciptakan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda lain tidak memiliki kesadaran “aku”. Dari aspek historisitas, kesadaran “aku” tidak memiliki asal usul seperti yang dicetuskan oleh Charles Darwin dalam teori evolusinya.⁹⁸ Sehingga, secara logika, definisi atau fondasi awal—dari pertanyaan siapakah manusia—yang diberikan oleh Armada Riyanto, dapat masuk kedalam kategori rasionalitas.

97 Djuretna A. Imam Muhni, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 35-36.

98 Lih. Armada Riyanto, *Aku & Liyan: Kata Filsafat dan Sayap*, Malang: Widya Sasana Publication, 2011, hlm. 10.

Konsep “aku” dalam diri manusia merupakan realitas yang memiliki cakrawala sangat luas. Menjadi kompleks ketika cakrawala kemanusiaan itu bersifat dinamis namun tetap. Dinamis memaksudkan bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang bersifat empiris. Misalnya kemampuan, keterampilan dan pengetahuan akan bertambah seiring dengan penelusuran perjalanan hidupnya. Bentuk fisik juga akan mengikuti jenjang umur. Akan tetapi, ke-”aku”-annya akan tetap sama. Kesadaran “aku” tidak akan berubah selama ia tetap menjadi manusia seutuhnya.

Kerumitan ini juga dapat ditemukan dalam konsep manusia sebagai makhluk individual. Makhluk individual bukan memaksudkan seperti halnya pandangan lazim yaitu mengarah pada egoisme. *Individual* memiliki kedalaman yang kompleks tetapi “indah”. Indah karena manusia merupakan satu-satunya ciptaanNya yang memiliki kompleksitas yang tinggi dibanding makhluk lainnya. Dalam penjelasan terkait hal ini, saya pikir Armada Riyanto dapat mempermudah imajinasi kita secara logis untuk menggambarkan apakah individu itu:

Tetapi “individu” tidak cuma untuk mendistingsi (membedakan) manusia yang satu dengan yang lain. Individu juga untuk mengatakan unisitas dan pluralitas sekaligus manusia satu dengan yang lainnya. Unisitas, sebab manusia bersatu dan harus bersatu sama lain [...] Sebab kehadiran individu-individu adalah kehadiran yang melukiskan kesatuan (unisitas) manusia itu sendiri. Seandainya manusia itu hanya “satu” saja (atau diandaikan tidak ada orang lain di sekitarnya) ia mungkin tidak bisa disebut “individu”, sebab mau dibedakan dari siapa. Tetapi, ketika ada individu-individu, manusia bersatu sama lain. Pluralitas, sebab manusia pada prinsipnya memiliki keunikan yang membedakan satu sama lain. Dalam kesatuan manusia paling kecil pun (seperti dalam keluarga) pluralitas kehendak, mimpi, cara berpikir, kesukaan dan seterusnya tidak mungkin digeneralisir.⁹⁹

Manusia itu adalah individual, dimana hal ini mengarahkan esensinya pada kesatuan umat manusia. Logika kesatuan atau unisitas yang berasal dari individu-individu sebagai makhluk bagian-bagian yang terpisah atau berbeda, menunjukkan suatu keindahan *human being*. Namun, esensi dari bagian-bagian yang terpisah atau perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu ini tidak serta merta tereduksi oleh unisitas itu sendiri. Melainkan, esensi perbedaan dari setiap individu-individu itu juga akan tetap tampil seimbang di dalam keunikannya yang khas. Itulah sebabnya, keindahan manusia sebagai makhluk yang berbeda tetapi satu, satu tetapi berbeda, mengantarkan dirinya ke dalam ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

99 Armada Riyanto, *Menjadi—Mencintai: Berfilsafat Teologi Sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm. 202-203.

Jika manusia adalah individu unisitas dan pluralitas, dengan sendirinya *kepribadian* mengambil tempat pada *diri* manusia. Namun, bagaimana kaitan antara *individu* dan *pribadi* manusia? Konsep tentang *pribadi* secara etimologis dijelaskan oleh Armada Riyanto bahwa, “Orang Yunani menyebut manusia persona atau pribadi (*prosophon*). Istilah “prosopon” dalam konteks waktu itu mengatakan “topeng” [...] Dalam topeng menjelaskan karakter, peran, dan disposisi emosi dari aktor dalam keseluruhan cerita”.¹⁰⁰ Jika merujuk pada aspek etimologis kata *pribadi*, maka halnya mengatakan bahwa *pribadi* juga termasuk dalam konsep *individu*. Individu yang berkepribadian memiliki indikasi unisitas sekaligus pluralitas juga. Namun demikian, individu yang berkepribadian pada hakikatnya melahirkan relasionalitas perdamaian. *Mencintai* menjadi fondasi keutamaan individu yang berkepribadian. Artinya—dalam hal ini Armada Riyanto juga menegaskan bahwasanya ketika individu-individu yang berkepribadian niscaya berjumpa dengan yang lain, maka saat itu juga relasi tersebut memainkan peranan *cinta*.¹⁰¹

Dengan demikian, kita dapat menjawab pernyataan Durkheim jika manusia terbentuk dari pemikiran kolektivitas adalah merupakan suatu reduksi kemanusiaan. Reduksi kemanusiaan bukan dalam ranah etika-humanisme, tetapi dalam ranah epistemologi. Dalam perspektif historis-kronologis-posmodern, pandangan Durkheim memang cukup tepat. Sebab, ketika manusia lahir, ia akan “dipengaruhi” atau “dididik” oleh lingkungan yang sangat kental akan dominasi tertentu. Artinya, dominasi yang berasal dari globalisasi dan kapitalisme, misalnya, bertujuan untuk bersaing—bahkan menjadi fokus utama—untuk merebut kesadaran manusia.

Metamorfosa sistem kapitalisme membuat manusia terdistorsi kesadarannya dengan cara yang “halus” dan “mendalam”. Setiap aktivitas manusia, mulai sejak lahir hingga dewasa, terbelenggu oleh—dalam bahasa Martin Heidegger—*mengada-mengada* atau suatu entitas yang dapat “meminggirkan” otentisitas manusia individu yang berkepribadian. Misalnya, seseorang yang telah berjasa kepada penguasa kapitalis mendapat penghargaan, sehingga ia akan tetap setia melayaninya sampai kapan pun. Penghargaan-penghargaan inilah yang membelenggu kesadaran otentik kemanusiaannya sehingga ia lupa dan acuh terhadap adanya ketidakadilan yang terjadi disekitarnya.

Eksistensi manusia, khususnya pada era globalisasi ini, berada pada tingkatan yang krusial. Krusialitas ini disebabkan oleh kesadaran yang terdistorsi. Terdistorsi oleh kebenaran palsu dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh penguasa kapitalis. Bagaimana manusia individu

100 *Ibid.*, hlm. 210.

101 *Ibid.*, hlm. 211.

dapat meluruskan kesadarannya yang terdistorsi ini? Dalam situasi seperti ini menurut Franz Magnis-Suseno bahwa manusia membutuhkan *etika*. Etika bukan memaksudkan sebuah *sopan-santun* dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan—ia lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar *tentang* ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.¹⁰²

Etika juga dapat disebut sebagai orientasi hidup. *Orientasi* memaksudkan adanya kepekaan lingkungan dan pandangan yang kritis. Seseorang dapat menjalani kehidupan dan menjawab gempuran kapitalisme dengan suatu orientasi hidup yang kritis. Etika Franz Magnis Suseno sangat penting untuk diimplementasikan terlebih kepada para generasi muda yang sangat mudah untuk dipengaruhi.

Orientasi hidup menjadi *tools* kehidupan manusia untuk mempertanyakan segala sesuatunya hingga mendapatkan suatu nilai-nilai kebenaran. Akan tetapi, menurut saya, etika dalam perspektif Franz Magnis Saseno masih perlu ditambahkan dengan konsep yang lebih menyentuh ke akar persoalan, yaitu tentang *kesadaran*. Konsep awal tentang *kesadaran* ini pertama-tama kita perlu merujuk kepada apa yang dimaksudkan oleh Armada Riyanto:

Bahasa Latin untuk Kesadaran adalah *Conscientia*. Istilah ini memiliki arti yang menarik. Ia terdiri dari dua kata “cum” (dengan) dan “scientia” (pengetahuan). Jadi, untuk sementara kita diberi tahu makna yang mudah. Kesadaran adalah “dengan pengetahuan”. Kesadaran di sini bukanlah lawan dari kemabukan atau ketidaksadaran (seperti pingsan). Ketidaktahuan adalah bentuk ketidaksadaran.¹⁰³

Jadi dengan demikian, ketika kita hendak ber*etika*—dalam ranah mengorientasikan diri terhadap lingkungan—maka kita perlu mencari dan memperoleh suatu *pengetahuan* yang menjadi fondasi *orientasi* kehidupan. Tanpa adanya suatu *pengetahuan*, maka seseorang dengan sendirinya tidak dapat mengorientasikan dirinya. Justru ia akan terjerumus pada posisi yang tidak terarah. Sebab, ia berada pada posisi *tidak sadar*. Terlebih lagi, dalam lingkungan globalisasi seperti saat ini—sistem kapitalisme yang sudah bermetamorfosa—justru *menggiring* manusia untuk memiliki kesadaran dalam bentuk yang diharapkan, yaitu kesadaran-kapitalis.

102 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 14.

103 Armada Riyanto, *op.cit.*, hlm. 98.

Peranan etika dalam hal ini tidak hanya mengejar nilai kebaikan. Kebaikan merupakan salah satu fondasi dari etika itu sendiri. Namun, fondasi lain yang cukup penting untuk menggapai dan memperkokoh kebaikan adalah dengan kesadaran itu sendiri. Kesadaran berarti memiliki dan mempergunakan *pengetahuan*. Sehingga, etika juga identik dengan *pengetahuan*. Tanpa adanya *pengetahuan* manusia tidak dapat menjalani kehidupannya secara etis. Tanpa *pengetahuan* manusia akan tetap terjerumus dalam kesadaran palsu. Ia tidak tahu apa-apa mengenai kebaikan dan kebenaran. Ia selalu berada pada posisi yang nyaman sekaligus tak berkeinginan untuk 'keluar'. Dengan sendirinya, ia tidak dapat melakukan orientasi diri terhadap realitas. Ia juga tidak dapat beradaptasi dan mempertanyakan kehidupan yang dijalannya. Manusia individu yang berkepribadian, sejatinya memegang *etika* sebagai salah satu prinsip ilmu yang dapat menuntunnya ditengah persaingan global.

2. Kesadaran Sosialitas Aku-Engkau

Manusia memang makhluk yang individualis. Akan tetapi jawaban atas pertanyaan apakah manusia itu, tidak berhenti di sini. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang demikian kompleks. Konsekuensinya dibutuhkan perspektif lain yang dapat menjelaskan siapakah manusia. K. Bertens menuliskan pendapat Aristoteles tentang kodrat manusia:

Dalam buku I dari *Politica*, Aristoteles mengatakan bahwa manusia menurut kodratnya merupakan *zōion politikon*: makhluk yang hidup dalam *polis* [...] Perkataan Aristoteles ini sering diterjemahkan dalam terminologi modern dengan mengatakan bahwa "manusia adalah makhluk sosial". Terjemahan ini sebagian benar juga. Tetapi Aristoteles bermaksud lebih daripada makhluk sosial begitu saja. Buat dia, manusia (dalam arti yang sepenuh-penuhnya) menurut kodratnya hidup dalam *polis* sebagaimana dimengerti oleh masyarakat Yunani.¹⁰⁴

Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia adalah merupakan makhluk yang bermasyarakat. Tentu saja ini terlihat dari perspektif sosial budaya dan politik yang dipakai oleh Aristoteles. Pada sekitar abad ke-8 dan ke-7 SM di Yunani, *polis* merupakan suatu bentuk kemasyarakatan baru. *Polis* adalah suatu Negara kecil atau Negara-kota. Hal ini bukan saja menekankan pada Negara-kota itu, tetapi juga memperhatikan sosialitas yang hidup dalam Negara-kota itu. *Polis*, dengan demikian, merupakan pusat segala aktivitas kehidupan sehari-hari manusia seperti dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan religius. *Polis* juga dapat diartikan dengan *agora* yang berarti *pasar*. Tetapi *pasar* disini bukan memaksudkan suatu

104 Kutipan ini diambil dalam teks dan juga catatan kaki dalam: Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 200.

tempat penjualan kebutuhan sehari-hari. Melainkan tempat berkumpulnya masyarakat untuk berelasi, berinteraksi dan berdiskusi secara bebas dan transparan.¹⁰⁵

Dari sini Aristoteles membawa kita memasuki dimensi relasionalitas kemanusiaan. Meskipun manusia merupakan makhluk individual, akan tetapi ia juga merupakan makhluk yang berelasi. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa keberadaan yang lain. Kehadiran yang lain memunculkan eksistensinya. Terkait dengan hal itu, Armada Riyanto menguraikan konsep *polis* secara mendalam melalui refleksi filosofis-teologisnya. Manusia niscaya hidup bersama dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dalam eksistensi manusia pertama. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, ia hidup dalam kesendirian. Akan tetapi *kesendirian* tidak terlalu tepat untuk menjelaskan eksistensi Adam. Adam telah berinteraksi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya, Adam berelasi dengan Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa Adam (manusia) telah diciptakan untuk berkomunikasi, berjumpa, berinteraksi, menjalin hubungan dan berelasi dengan sesama. Relasi awal yang dilakukan Adam adalah sebuah relasi dengan penciptanya.¹⁰⁶

Jika secara kronologis perkembangan peradaban manusia dilihat dari perspektif teologis (kisah penciptaan Adam), maka dengan sendirinya manusia secara kodrati tidak pernah hidup *sendirian*. Ia akan selalu hidup bersama dengan yang lain. Dari konteks ini kita dapat mengetahui bahwa manusia individu pertama-tama akan membentuk perkumpulan kecil yang disebut dengan *keluarga*. Keluarga tidak sama dengan bentuk kelompok masyarakat. Franz Magnis-Suseno menjabarkannya sebagai berikut:

Keluarga adalah satuan kesosialan manusia yang akrab. Persatuannya berdasarkan minat spontan dan ditunjang oleh perangkat instingtual yang kuat. Karena itu keluarga tidak membutuhkan hukum formal, aturannya dipelajari manusia secara spontan dalam pangkuan keluarganya dan kesatuannya didukung oleh perasaan kebutuhan kebersamaan dan kesadaran tanggung jawab yang tumbuh dengan sendirinya.¹⁰⁷

Terbentuknya keluarga memiliki fondasi pada relasi kebutuhan akan *kebersamaan* dan kesadaran akan *tanggung jawab*. Bukan pada ikatan yang muncul pada aturan-aturan institusional (formal) dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya. Relasi *kebersamaan* lebih mendasar diterangkan oleh Armada Riyanto dengan mengatakan bahwa:

105 Lih. *Ibid.*, hlm. 25-28.

106 Lih. Armada Riyanto, *Aku & Liyan: Kata Filsafat dan Sayap*, *op.cit.*, hlm. 12-13.

107 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 18.

Dalam keluarga atau di dalam makna relasi kekeluargaan kita belajar mengenai makna “kita” dan “aku-engkau”. Keluarga yang baik adalah keluarga yang memberikan kemungkinan anggotanya untuk mengokohkan pemahaman mengenai siapa “aku” dan penghargaan kehadiran orang lain (“engkau”) sebagai bagian dari dirinya sehingga terbentuk “kita”.¹⁰⁸

Di sini pemahaman terbentuknya *kebersamaan* dalam lingkup keluarga diurai secara eksistensial dimana makna “aku” akan muncul dengan bercermin atas keberadaan “orang lain”. Ketika seorang ayah ‘memandang’ dirinya sebagai kepala rumah tangga, ia juga secara bersamaan ‘memandang’ anak dan istrinya berada pada zona kehidupan *dirinya*. Istri dan anaknya mejadi ‘cermin’ hidup bagi dirinya. Suatu perspektif eksistensial yang membawa ayah berada pada horizon lingkaran keluarga (ayah, istri dan anak) tanpa ada pemisah ruang dan waktu. Konsekuensinya, kenikmatan dan perjuangan hidup untuk berkeluarga menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu *kita* dan *kebersamaan* itu sendiri. Relasi eksistensial ini membawa individu-individu pada wilayah keutamaan hidup.

Secara etis, kesadaran akan *kebersamaan* ini juga tergantung pada nilai-nilai yang menjadi penggerak dan pengikatnya. Perjumpaan antara individu-individu dapat mungkin terjadi ketika terjalin suatu relasi yang khusus. Ketertarikan satu sama lain memiliki konsekuensi munculnya kesatuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesatuan ini dapat disebabkan dan akan berjalan dengan konsekuen karena fondasi akan jalinan *cinta*. *Cinta* dapat mendekatkan, menyatukan, dan mengikat individu-individu. Cinta tersebut merupakan cinta yang terarah pada yang lain. Namun, bagaimana jika konteksnya adalah cinta terhadap diri sendiri? Dalam buku IX Nicomachean Ethics, Aristoteles menegaskan bahwa cinta terhadap diri sendiri merupakan suatu egoisme. Cinta dimiliki oleh setiap individu. Tetapi mencintai memiliki makna keterarahan pada orang lain. Maknanya akan berubah jika cinta itu diberlakukan dan diterapkan pada diri sendiri.

Berbicara tentang cinta maka juga tak lepas dari pembahasan mengenai *persahabatan*. Lazimnya, persahabatan dipahami sebagai hubungan resiprositas antara dua orang atau lebih. Mereka saling mencintai sehingga membentuk suatu jalinan relasi yang khusus. Namun demikian, dalam pandangan Plato, persahabatan tidak berhenti pada hubungan resiprositas. Dibutuhkan suatu keutamaan yang dapat mengikat jalinan relasi. Keutamaan itu adalah *kebaikan*. Sehingga, persahabatan—dua orang yang bersahabat—memiliki satu tujuan untuk bersahabat, yaitu demi *kebaikan*. A. Setyo Wibowo menyimpulkan dari teks Plato atas dialog Socrates tentang persahabatan sebagai berikut:

108 Armada Riyanto, *Menjadi—Mencintai: Berfilsafat Teologi Sehari-hari*, *op.cit.*, hlm. 193.

Persahabatan bagi Platon bersifat segitiga di mana resiprositas antarpelakunya bersifat relatif (bukan yang utama). Hangatnya relasi timbal balik antar pelaku persahabatan hanyalah *efek* dari komitmen tiap pelaku persahabatan pada Kebaikan (pihak ketiga) yang ada di luar mereka. Kehangatan resiprositas tidak pernah menjadi tujuan dalam persahabatan.¹⁰⁹

Kita telah melihat bahwa secara etis Platon meletakkan fondasi *persahabatan* di wilayah pengejaran bersama akan *kebaikan*. Untuk memungkinkan *persahabatan* itu muncul demi tujuan *kebaikan*, perlu juga fondasi kesadaran diri yang dapat mengarahkan kepada *kebaikan*. Secara rasional, kita dapat memahaminya sebagaimana yang telah diilustrasikan oleh Armada Riyanto sebagai berikut:

Dalam persahabatan, “engkau” tidak lagi sebagai pribadi “lain” yang berbeda dari aku, melainkan menjadi “aku yang lain” yang *berbicara* kepadaku. Kesadaran mengenai *alteritas*-ku ini (atau pribadi lain sebagai “aku yang lain”) diperlukan justru agar aku semakin menjadi aku sejati. Aku sejati adalah aku yang bukan aku *egois* melainkan aku *subjek*. Aku egois adalah aku yang bertindak hanya demi dan untuk aku sendiri. Tindakan ini menyisihkan pribadi lain, menindas kepentingan yang lain, menegasi keberadaan yang lain, bahkan menghancurkan yang lain.¹¹⁰

Langkah apa yang pertama-tama kita ambil untuk dapat menciptakan *persahabatan* yang terarah pada *kebaikan*? Pernyataan di atas merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Membebaskan diri (*self*) dari *ego* merupakan tindakan awali. Filsafat Cartesian mengajarkan kepada kita bahwa ketika *Cogito Ergo Sum* (Aku Berpikir Maka Aku Ada) terbangun, maka totalitas interioritas mulai muncul. Kesadaran akan keaku-an memainkan peranannya (secara dominan) dengan menegasikan objek *diluar* aku (subjek). Konsep Cartesian memiliki kecenderungan untuk ‘mengembalikan’ seluruh realitas yang ada diluar dan memusatkan perhatian dan kepentingannya kepada *aku*. Hanya *aku* yang menjadi realitas kepentingan hidup. Realitas yang ada diluar *aku* menjadi asing dan bahkan dapat dijadikan suatu objek dominasi kekuasaan.

Dalam makna *persahabatan* yang diusung oleh Armada Riyanto diatas, objektivitas sudah tidak berlaku lagi. Secara ontologis tidak ada lagi objek. Yang ada hanyalah subjek. Ketika Yang Lain menjadi subjek, konsekuensinya muncul suatu kesadaran baru atas struktur tatanan sosialitas, yaitu *sesama-manusia*, manusia yang sederajat dan bermartabat. *Persahabatan* dalam kesadaran seperti ini akan dengan sendirinya membawa individu maupun kelompok masyarakat pada suatu tatanan sosialitas yang baik.

109 A Setyo Wibowo, *Platon: Lysis (Tentang Persahabatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2015, hlm. 152.

110 Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, hlm. 192.

Selain dari keutamaan kebaikan yang menjadi tujuan utama persahabatan, unsur *dialogal* juga menjadi tema penting dalam konteks menjalin relasi sesama. *Dialogal* merupakan fondasi individu-individu untuk dapat bersatu membangun keluarga, kelompok masyarakat dan Negara. Armada Riyanto bahkan mengatakan bahwa, “Sebuah societias memiliki karakter “dialogal” karena manusia hidup bersama dengan sesamanya [...] Kebersamaan manusia memproduksi kodrat baru kehidupan manusia, ia *berdialog* dengan sesamanya yang lain. Akal budi manusia dianugerahkan Sang Pencipta dengan maksud agar ia *berdialog*.¹¹¹

Terbentuknya keluarga, kelompok masyarakat dan Negara mewajibkan syarat mutlak untuk dijalankan, yaitu dengan *berdialog*. Karena dimensi *dialogal* merupakan kodrat manusia individu-individu untuk dapat menjalin relasi satu sama lain. Bahkan ketika Adam diciptakan dan belum ada manusia lain yang diciptakan, ia tidak hidup dengan kesunyian (diam). Adam berinteraksi dengan Tuhan ketika Tuhan *berdialog* dengan Adam.¹¹² Inilah fondasi humanisme yang ditegaskan oleh Armada Riyanto. Hidup bermasyarakat adalah hidup dengan *berdialog*. Ketika *berdialog* maka individu memainkan peranannya dalam unisitas. Meskipun memiliki *pribadi* yang berbeda (pluralitas), kesatuan dan persatuan telah menjadi fondasi dan merupakan kodrat kemanusiaan itu sendiri.

3. Perjanjian Sosialitas Dialogal

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa manusia merupakan makhluk yang kompleks. Dalam dunia teosentrisme, muncul suatu keyakinan adanya *dosa* dan *neraka*. Konsekuensi ini menimbulkan keyakinan akan adanya *pahala* dan *surga*. Begitu juga dalam dunia antroposentrisme, terminologi *etika* muncul karena ada sebabnya. Manusia dikutuk untuk memiliki kebebasan, demikian perkataan Jean Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialisme era kontemporer. *Kebebasan* memiliki konsekuensi yang luas. Ia dapat memunculkan kebaikan dan keburukan. Tentu saja hal ini tergantung pada pilihan manusia. Dalam perspektif individualitas, untuk mengantisipasi kebebasan yang “liar” maka perlu ada penanaman tanggung-jawab dan kewajiban. Kebebasan selalu diikuti dengan kewajiban. Begitu juga sebaliknya, kewajiban mengharuskan adanya unsur kebebasan didalamnya.

Dengan demikian, ketika kebebasan “liar” tidak dapat dikontrol, maka diperlukan suatu hukum atau undang-undang yang diterapkan kepada seluruh masyarakat. Namun, sebelum menerbitkan undang-

111 *Ibid.*, hlm. 187.

112 Lih. Armada Riyanto, *Aku & Liyan: Kata Filsafat dan Sayap*, *op.cit.*, hlm. 16.

undang, perlu dibentuk suatu Negara. Mengapa Negara? Apakah Negara itu? Franz Magnis-Suseno menjabarkan apakah Negara itu demikian:

Kata “Negara”—sama dengan “*Staat*” dalam bahasa Jerman atau “*state*” dalam bahasa Inggris—mempunyai dua arti. Pertama, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brasilia merupakan Negara. Kedua, Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.¹¹³

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Franz Magnis-Suseno tentang Negara, maka dapat kita pahami bahwa Negara dibutuhkan untuk mengatasi kebebasan “liar” masyarakat. Sebab, Negara merupakan kesatuan politis yang dapat menata kehidupan manusia (masyarakat). Ketika berbicara mengenai Negara, maka dengan sendirinya kita juga akan mengenal terminologi *politik*. Dewasa ini terminologi politik merupakan sesuatu yang terdengar ‘kotor’. Sebab, Negara—dalam hal ini pemerintah di Negara ini—secara sadar memainkan peranannya sebagai aktor yang antagonis terhadap masyarakat. Berdasarkan hal itu, Armada Riyanto menegaskan pandangan Franz Magnis-Suseno terkait Negara:

Berfilsafat politik, bagi saya, bertolak dari pengamatan dan pengalaman keseharian, kemudian mengangkatnya menjadi sebuah diskursus aneka kebenaran tata hidup bersama yang dihidupi oleh *societas*.¹¹⁴

Dalam refleksi tersebut dapat kita simpulkan bahwa politik bukan semata-mata merupakan arena perebutan ideologi kekuasaan yang dengan berani mengorbankan humanisme sosialitas. Politik merupakan *tata hidup bersama* yang mengedepankan prinsip-prinsip humanisme sosialitas seperti rasionalitas dan relasionalitas. Negara dengan sendirinya mengedepankan politik sebagai suatu *tata hidup bersama*. Persoalannya adalah bagaimana *tata hidup bersama* dapat diwujudkan secara konkrit? Bukankah selama ini Negara memiliki strategi untuk mewujudkannya melalui lembaga-lembaga institusional yang menjadi bagian dari tugasnya? Inilah terobosan Armada Riyanto dalam membongkar kebekuan normatif politik yang ada di Negara ini. Ia mengedepankan metodologi induktif. Tolok ukur *tata hidup bersama* bermula dari kehidupan sehari-hari yang terwujudkan dalam pengalaman-pengalaman individu-individu. Kekayaan dari kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman setiap individu menjadi sumber *tata hidup bersama*. Kehidupan yang teratur dalam masyarakat mewajibkan kesadaran akan makna pengalaman kehidupan setiap individu yang berkepribadian. Sehingga, dengan

113 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, *op.cit.*, hlm. 170.

114 Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, *op.cit.*, hlm. 5-6.

demikian, unsur kesadaran sebagai *conscientia* merupakan fondasi *tata hidup bersama*.

Berbeda dengan Armada Riyanto, bagi seorang filosof politik modern—Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia memiliki kodrat (*state of nature*) untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup memiliki sebabnya. Ketika individu-individu hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, sementara sumber daya alam yang dikelola juga tidak dalam sesuatu yang terstruktur dan terbatas, maka muncul suatu kompetisi atau persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Hal ini juga secara bersamaan muncul suatu kecurigaan dan ketidakpercayaan antar sesama. Sehingga muncul suatu tindakan untuk menguasai dengan cara menyingkirkan yang lain. Tindakan kehendak untuk menyaingi dan berkuasa juga merupakan kodrat (*state of nature*) individu manusia.

Dengan demikian, agar terhindar dari malapetaka yang dapat memusnahkan kehidupan eksistensi manusia, maka menurut Hobbes dibutuhkan suatu strategi yang dapat menata kehidupan. Strategi tersebut adalah berupa *perjanjian*. Perjanjian tersebut berupa didirikannya suatu lembaga yang dapat mengatur tata hidup bersama agar tidak terjadi keburukan sosial. Peran dari lembaga ini adalah mengatur tata hidup bersama sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Lembaga inilah yang disebut dengan *Negara*.¹¹⁵

Kebutuhan masyarakat atas *perjanjian Negara* ini mungkin adalah merupakan kesamaan pemikiran Thomas Hobbes dan Armada Riyanto. Ketika kodrat manusia adalah untuk mempertahankan diri, bersaing dan berkuasa—seperti yang dikemukakan oleh Hobbes—maka di sisi lain manusia individu juga memiliki kodrat untuk *berdialog*, *bernegosiasi*, *berjumpa untuk bersahabat* dan dengan demikian memunculkan suatu ide untuk melakukan *perjanjian*. Ketika masyarakat memiliki kekhawatiran, keresahan dan ketakutan akan kodrat yang dikemukakan oleh Hobbes, muncul pengharapan dan cita-cita untuk menuju kepada kebaikan. *Jalan* menuju kebaikan ini tak lain adalah dengan cara membangun *relasi* untuk dapat *berdialog* dan *bernegosiasi*. Dengan *berdialog*, hal ini memungkinkan setiap individu-individu melakukan perjanjian demi menggapai suatu kebaikan, yaitu *tata hidup bersama*. Di sini Armada Riyanto memperdalam dan mengkonkritkan konsep *perjanjian* Hobbes dengan memanisfestasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana, yaitu *berdialog*.

Jika filsafat politik Hobbes kita jadikan fondasi dalam tulisan ini, maka Negara memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk

115 *Ibid.*, hlm. 205-207.

memunculkan *tata hidup bersama*. Selain diberlakukannya hukum atau undang-undang, Negara perlu memiliki *jalan* yang luas dan lebar agar rakyatnya dapat hidup dengan baik. Adapun kewajiban-kewajiban Negara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan kebiasaan-kebiasaan moral kepada masyarakat. Itulah sebabnya salah satu peran dan hakikat daripada sebuah pendidikan adalah untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan moral pada peserta didiknya.

Dalam *Nicomachean Ethics*, Buku II, Aristoteles menguraikan bagaimana menerapkan kebiasaan baik kepada manusia. Dan, ini adalah hal yang sangat mungkin (rasional) untuk dilakukan. Sebab, selain memiliki kodrat sebagai makhluk *polis*, manusia juga memiliki kodrat sebagai manusia individu yang baik. Meskipun manusia juga memiliki sifat-sifat yang buruk. Untuk itu dibutuhkan penerapan suatu *kebiasaan*. Aristoteles mencontohkan jika kodratnya benda yang dilempar ke atas akan jatuh, maka dengan melemparkannya ke atas berulang kali (pembiasaan) akan menjadi sia-sia. Sebab, kodrat hukum alam mengatakan adanya daya tarik bumi. Namun sebaliknya, manusia memiliki kodrat kebaikan dan secara alamiah dengan sendirinya memiliki kemampuan atas kebajikan, yaitu kebaikan. Sehingga, penerapan *kebiasaan* ini memungkinkan untuk dilakukan. Justru ketika tidak dibiasakan untuk diasah kemampuannya, maka manusia akan jatuh pada suatu keburukan.¹¹⁶

Pembiasaan ini sekiranya perlu untuk diterapkan pada ranah hukum atau undang-undang. Dewasa ini kita telah mengetahui bahwa pemerintah (Negara) telah memiliki hukum dalam ranah pembiasaan moral. Pendidikan secara terstruktur dikelola oleh Negara. Meskipun ada juga yang terlepas dari Negara (pendidikan swasta), namun mereka tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan kualitas mutu pendidikannya kepada Negara secara berkala. Menjadi persoalan ketika pendidikan dan bahkan hukum itu sendiri telah “ditunggangi” oleh kekuasaan sistem kapitalisme yang hanya memfokuskan dirinya pada *profit oriented* semata.

Dengan demikian, nilai keutamaan *keadilan* menjadi tema penting yang perlu diterapkan kepada kesadaran manusia, khususnya dalam hal ini pemerintahan. Jika berbicara tentang *problem* kapitalisme, Aristoteles menyumbangkan pemikirannya tentang keadilan dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam aspek ekonomi ini memainkan peranan *resiprositas*.

Sebagai contoh, interaksi manusia dalam jual beli dahulu kala menggunakan sistem *barter* dimana secara langsung kebutuhan hidup di dapat dengan cara menukarkannya dengan barang lainnya sesuai

116 Lih. Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah “Kitab Suci” Etika*, Jakarta: Teraju, 2004, hlm. 29-31, Penerjemah, Embun Kenyowati, Editor, M. Ihsan.

dengan “nilainya”. Jika si A membutuhkan 1 kg beras, ia harus menukarkan barangnya yang senilai dengan 1 kg beras itu seperti misalnya dengan 1 kg telur (andaikan harga jual 1 kg beras dan 1 kg telur sama). Akan tetapi akan menjadi sulit jika si B hendak membutuhkan rumah. Ia tidak dapat menukarkan 20 lemari untuk menyamakan “nilai” dari rumah itu, walaupun nilai tukarnya sama. Sebab si A (pemilik rumah) tidak akan merasa puas jika rumahnya ditukarkan dengan barang sebanyak 20 lemari (walaupun “nilainya” sama). Sehingga, menurut Aristoteles, uang atau *currency* menjadi penting dan dibutuhkan. Mata uang berfungsi untuk menjembatani pertukaran kebutuhan barang yang memiliki perbedaan yang jauh seperti satu rumah dengan 20 lemari.

Akan tetapi, letak keadilan bagi Aristoteles bukan pada mata uang yang digunakan. Melainkan terletak pada *penerapan* mata uang pada barang yang digunakan. Misalnya si A menjual 1 kg beras dengan harga yang melebihi “nilai” jual dari 1 kg beras itu. Si B akan merasa terbebani dengan nilai harga jual yang tidak wajar. Hal ini merupakan ketidakadilan. Seharusnya, si A menetapkan harga jual 1 kg beras *sama nilainya* dengan seandainya ditukarkan dengan 1 kg telur. Di sinilah letak keadilan dalam aspek ekonomi menurut Aristoteles.¹¹⁷

Jadi dalam etika bisnis Aristotelian, jalinan relasi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat difondasikan pada prinsip *keadilan resiprokal*. Secara merata kebutuhan hidup yang dikehendaki tidak akan mengarah pada kekurangan dan kelebihan. Semua manusia individu mendapatkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan yang dimiliki dan dibutuhkan juga dengan yang lain. Dalam hal ini, Aristoteles menginginkan suatu kehidupan masyarakat tanpa kelas. Tidak ada yang lebih kaya atau lebih kekurangan di antara yang lainnya. Semua memiliki apa yang dikehendaki dan dibutuhkannya.

Mungkin pola pikir dan pendidikan semacam inilah yang perlu diterapkan oleh Negara (pemerintahan). Ditengah berjalannya sistem kapitalisme ini tentu saja tidak mudah. Sebab, kapitalisme sungguh bertolak belakang dengan konsep keadilan resiprokal Aristotelian. Kapitalisme, sekali lagi, bertujuan untuk mengembangbiakkan keuntungan, bukan mendapatkan apa yang dibutuhkan secara merata. Semakin banyak keuntungan yang di dapat, semakin terpenuhi harapannya. Meskipun dewasa ini kapitalisme telah banyak menyesuaikan dirinya untuk memperhatikan *stakeholders*, akan tetapi masih banyak juga yang menutup mata batinnya terhadap dampak yang dialami oleh orang lain atas keserakahannya dan terlebih terhadap lingkungan hidup.

117 Lih. *Ibid.*, hlm. 123-127.

4. Penutup

Arus globalisasi memang deras menghantam segala sendi kehidupan manusia. Akan tetapi sebagai individu yang berkepribadian, kita dapat menghadapinya bukan dengan cara melawan arus tersebut. Melainkan dengan cara; *pertama*, mengenal orientasi hidup (etika) yang juga memiliki unsur-unsur kesadaran akan konsep *individu* yang berkepribadian sebagai sesuatu yang *indah*; *kedua*, menggunakan kesadaran akan dialogal-relasionalitas untuk mendapatkan *persahabatan* demi menuju suatu *kebaikan*.

Di dalam filsafat Konfusius, hal-hal kecil merupakan fondasi terbentuknya hal-hal yang besar. Untuk mendapatkan keluarga yang baik, kita perlu menjadi pribadi yang baik. Untuk mengubah kelompok masyarakat menjadi baik, kita perlu menjadikan keluarga kita baik. Untuk menjadikan Negara kita baik, kita perlu mengubah kelompok masyarakat kita menjadi baik. Ketika Negara menjadi baik, kelompok-kelompok masyarakat menjadi baik. Ketika kelompok masyarakat baik, keluarga menjadi baik. Ketika keluarga menjadi baik, pribadi individu pasti juga baik. *Baik* bukan memaksudkan kesopanan dan kemurahan hati. *Baik* memaksudkan adanya proses rasionalitas dan relasionalitas etis dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tata hidup sosialitas.

Individu yang berkepribadian menjadi tolok ukur tata hidup bersama. Negara perlu merespon keindahan individu-individu yang memiliki pribadi-pribadi unik. Bukan ikut “hanyut” dalam kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh segelintir individu-individu. Ketika Negara “hanyut”, sesungguhnya hanyalah peran cinta terhadap diri sendiri yang muncul dalam kesadarannya. Ketika Negara “hanyut”, konsep individu yang berkepribadian menjadi sebuah kekacauan. Kekacauan yang mengakibatkan pada dehumanisasi universal. Manusia merupakan makhluk yang berkesadaran. Dengan sendirinya Negara juga memiliki kesadaran. Manusia membentuk Negara. Negara merupakan manusia itu sendiri.

*) **Antono Wahyudi**
Mahasiswa Program Magister STFT Widya Sasana, Malang. Email: antono.wahyudi@ymail.com

BIBLIOGRAFI

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah “Kitab Suci” Etika*, Jakarta: Teraju, 2004, hlm. 29-31, Penerjemah, Embun Kenyowati, Editor, M. Ihsan.
- Armada Riyanto, *Aku & Liyan: Kata Filsafat dan Sayap*, Malang: Widya Sasana Publication, 2011.
- _____, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- _____, *Menjadi—Mencintai: Berfilsafat Teologi Sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- A Setyo Wibowo, *Platon: Lysis (Tentang Persahabatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Djuretna A. Imam Muhni, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- _____, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.